

INTISARI

Undang-Undang No.40 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian yang teknis pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan terbaru yang mengatur standar pelayanan kefarmasian secara khusus farmasi klinik adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. M. Yunus Bengkulu merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu dengan dua apoteker diposisi struktural dan sembilan apoteker diposisi fungsional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di RSUD DR. M. Yunus Bengkulu berdasarkan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-observasional dengan pendekatan *cross-sectional* (potong lintang). Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. M. Yunus Provinsi Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada empat apoteker yang melakukan pelayanan farmasi klinik dan bekerja minimal 10 tahun di RSUD DR. M. Yunus Bengkulu dan observasi dokumen pelaksanaan kegiatan farmasi klinik sebagai data pendukung.

Pelayanan farmasi klinik yang telah diterapkan di RSUD DR. M. Yunus Bengkulu berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 adalah 9 kegiatan dari 11 kegiatan farmasi klinik yang dipedomankan. Besar persentase keseluruhan pelayanan farmasi klinik yang diterapkan adalah 81,8%. Adapun persentase tiap kegiatan farmasi klinik yaitu pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, konseling dan pemantauan terapi obat sudah mencapai persentase sebesar 100% (telah diterapkan sepenuhnya). Sementara untuk empat kegiatan yang belum memenuhi presentase 100% (belum diterapkan sepenuhnya) adalah kegiatan PIO 87,5%, *visite* 50%, MESO 33,3%, Dispensing Sediaan Steril 66,67% dan untuk dua kegiatan farmasi klinik lainnya yaitu EPO dan PKOD belum diterapkan.

Kata Kunci: Farmasi Klinik, Permenkes No.72 Tahun 2016, RSUD Bengkulu

ABSTRACT

Law No. 40 of 2009 states that pharmacy services at hospitals must obey Pharmaceutical Service Standards, the technical implementation of which is regulated in the Minister of Health Regulation. The latest Minister of Health regulation that regulates pharmaceutical service standards specifically for clinical pharmacy is the Minister of Health Regulation No. 72 of 2016 concerning Standard Pharmaceutical Services at Hospitals. DR M. Yunus Regional General Hospital of Bengkulu is the highest referral hospital in Bengkulu Province with two pharmacists in the structural position and nine pharmacists in the functional position. This study aims to determine the profile of the implementation of clinical pharmacy services in DR M. Yunus Regional General Hospital of Bengkulu based on Minister of Health Regulation No. 72 of 2016.

This study was a descriptive-observational study with a cross-sectional approach. The study was conducted at DR M. Yunus Regional General Hospital of Bengkulu. Data collection was carried out through questionnaires to four pharmacists who performed clinical pharmacy services and worked at least 10 years in the DR M. Yunus Regional General Hospital of Bengkulu and observation of document implementation of clinical pharmacy activities as supporting data.

Clinical pharmacy services that have been applied in the DR. M. Yunus Regional General Hospital of Bengkulu based on Minister of Health Regulation number 72 of 2016 is 9 activities from 11 clinical pharmacy activities that are guided. The overall percentage of clinical pharmacy services applied is 81.8%. The percentage of each clinical pharmacy activity is prescription study and service, history of drug use history, drug reconciliation, drug therapy counseling and monitoring have reached a percentage of 100% (fully implemented). While for the four activities that did not meet the 100% percentage (not yet fully implemented) were PIO 87.5%, visite 50%, MESO 33.3%, Dispensing Sterile Preparations 66.67% and for two other clinical pharmacy activities namely EPO and PKOD has not been implemented.

Keywords: *Clinical pharmacy, Regulation Ministry of Health Number 72 in 2016, Regional General Hospital of Bengkulu.*